

ABSTRAK

Angka korupsi yang tinggi pada pemerintah daerah dapat menjadi permasalahan krusial yang menghambat pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *e-government*, transparansi, serta akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023. Dari seluruh populasi yang ada, didapatkan 147 sample dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, laporan evaluasi SPBE, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), serta situs resmi pemerintah daerah. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapati temuan bahwa variabel *e-government*, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh simultan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Secara parsial, variabel *e-government* dan transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, sedangkan untuk variabel akuntabilitas belum menunjukkan adanya pengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

Kata kunci: *E-Government*, Transparansi, Akuntabilitas, Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah.